

BAB IV

SIMPULAN

Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk meninjau prosedur Audit dengan Tujuan Tertentu atas tata kelola PBJ bagi penanganan Covid-19 serta meninjau kesesuaiannya dengan teori dan pedoman yang berlaku. Selain itu, penulis juga turut melakukan tinjauan atas simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur atas tata kelola PBJ tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan, diperoleh simpulan sebagai berikut.

- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu atas proses PBJ untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tata cara Audit dengan Tujuan Tertentu yang tercantum pada Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020.
- 2) Dalam pedoman tersebut, audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas PBJ yang dilaksanakan melalui penyedia ataupun swakelola. Tahapan audit tersebut terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun perbedaan dari audit yang dilaksanakan atas PBJ melalui penyedia dan swakelola terdapat pada jumlah prosedur audit dalam tahap pelaksanaan, yaitu 9 (sembilan) prosedur pada audit PBJ melalui penyedia dan 3 (tiga) prosedur pada audit PBJ melalui swakelola.

- 3) Audit dengan tujuan tertentu atas PBJ untuk penanganan Covid- oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur seluruhnya dilaksanakan atas proses PBJ melalui penyedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
- 4) Berdasarkan tinjauan penulis, secara umum prosedur audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara yang tercantum pada Surat Edaran Kepala BPKP terkait, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) buah prosedur audit yang tidak dilaksanakan, yaitu pengujian kesesuaian perencanaan proses PBJ dan pengujian atas pelaksanaan proses PBJ. Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan, yang tercantum pada Lampiran 2,3, dan 14, ketiadaan prosedur audit tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, waktu penugasan audit selama 2 (dua) minggu yang relatif singkat juga menyebabkan Inspektorat harus membuat prioritas prosedur yang harus dilaksanakan dan ketiadaan 2 (dua) prosedur audit terkait.
- 5) Alasan lain dari ketiadaan 2 (dua) prosedur audit dengan tujuan tertentu tersebut adalah hasil identifikasi proses bisnis dan risiko yang tercantum pada Lampiran 5. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menitikberatkan pelaksanaan audit pada pengujian kewajaran harga sehingga hanya melaksanakan 7 (tujuh) buah prosedur audit sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.
- 6) Akibat tidak dilaksanakannya 2 (dua) buah prosedur audit dengan tujuan tertentu tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur meyakini bahwa tidak ada dampak, baik terhadap pelaksanaan audit maupun hasil audit dengan

tujuan tertentu atas proses PBJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. 7 (tujuh) buah prosedur audit yang dijalankan tetap dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk menyimpulkan hasil audit serta rekomendasi yang harus diberikan atas tata kelola PBJ untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.

- 7) Berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan dan berbagai bukti dan temuan audit yang diperoleh, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menyimpulkan bahwa proses PBJ bagi penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada tahap penetapan penyedia dan pembuktian kewajaran harga PBJ. Selain itu, hasil tinjauan penulis juga menunjukkan bahwa Inspektorat Lampung Timur telah merumuskan simpulan tersebut sesuai dengan hasil identifikasi risiko, bukti, dan temuan yang didapat selama proses pelaksanaan audit
- 8) Adapun rekomendasi yang diberikan adalah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan atas dokumen PBJ yang belum sesuai, yaitu dokumen pendukung bukti kewajaran harga dan notulen rapat penunjukan penyedia. Hasil tinjauan penulis menunjukkan bahwa Inspektorat Lampung Timur telah memberikan rekomendasi terhadap proses PBJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan temuan dan kelemahan yang didapatkan selama masa audit.